



Sejauh ini, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menekankan tetap akan menerapkan kebijakan lima hari sekolah meskipun Presiden mewacanakan penerbitan perpres. "Kami sudah menyampaikan surat edaran ke sekolah-sekolah mengenai kebijakan lima hari sekolah pada tahun ajaran 2017/2018. Sampai sekarang, surat edaran itu belum dicabut sehingga kebijakan lima hari sekolah tetap berlaku," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana di Yogyakarta, kemarin.

Menurut dia, sebelum rencana lima hari sekolah digulirkan oleh kementerian, sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta sudah menyelenggarakan lima hari sekolah dan hasilnya cukup baik. Berdasarkan penilaian Disdik Kota Yogyakarta, pencapaian dan penyelenggaraannya berjalan baik. Meskipun demikian, lanjut Edy, kebijakan lima hari

sekolah tersebut tetap akan menjadi keputusan dan kebijakan setiap sekolah.

Muhadjir Effendy juga menegaskan, program lima hari sekolah yang ia sebut Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tetap berjalan. "Program tersebut tetap dilaksanakan," kata dia di kantor Kemendikbud, Selasa (20/6). Mendikbud mengatakan, permendikbud itu hanya akan ditingkatkan dengan peraturan presiden setelah pembahasannya melibatkan beberapa pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan organisasi kemasyarakatan.

Ia menegaskan, rencana kebijakan lima hari sekolah (LHS) merupakan keputusan Rapat Kabinet Terbatas pada 3 Februari 2017 tentang program *Nation Branding*. Dalam rapat itu, Presiden menyetujui usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait menyinkronkan libur se-

kolah dengan libur pegawai.

Tujuannya, hari Sabtu dan Ahad dapat digunakan sebagai waktu berlibur masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya dan alam Indonesia. "Oleh karena itu, hal tersebut agar ditindaklanjuti. Jadi tidak benar kalau masalah tersebut belum pernah dibahas di rapat kabinet terbatas," kata dia.

Kemendikbud juga akan segera menyampaikan izin prakarsa tentang perpres PPK kepada Kementerian Sekretariat Negara. "Ini arahan dari Presiden. Saya kira prosedurnya akan berbeda dengan yang umum. Tim dari biro hukum dan organisasi dan staf ahli bidang regulasi sedang menyusun dokumennya. Besok kita sampaikan ke Setneg," kata Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi Chatarina Mulia Girsang dalam keterangan tertulis yang diterima *Republika*, kemarin.

Ia menegaskan, Permendikbud tentang Hari Sekolah masih berlaku sampai digantikan dengan peraturan baru. Dia pun melanjutkan, pembahasan penyusunan petunjuk teknis (juktis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) sedang dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan yang sedang disusun. "Tentu kita akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam setiap penyusunan drafnya," ujar Chatarina.

Selain itu, ia berujar, Kemendikbud akan menggandeng dan melibatkan elemen masyarakat untuk melakukan uji publik. Ia mengatakan, PPK merupakan amanat Nawacita yang bertujuan untuk menyiapkan generasi emas 2045. Chatarina menuturkan, setidaknya terdapat sekitar 8.000 sekolah yang telah mendapatkan pelatihan penerapan praktik PPK dari Kemendikbud sejak 2016.

Di lain pihak, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, penundaan pemberlakuan

kebijakan sekolah lima hari saat ini menyusul adanya pro dan kontra dari masyarakat. "Intinya itu belum diberlakukan pada saat ini. Diperbaiki. Jadi intinya permen itu karena masih menimbulkan pro dan kontra, untuk supaya tidak ada pro dan kontranya kan yang namanya permen diperbaiki juga nggak apa-apa," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (20/6).

Ia tak menyangkal, gagasan ini sebenarnya telah dilaporkan kepada Presiden pada Februari 2017 oleh Mendikbud. Kendati demikian, pro dan kontra muncul menanggapi terbitnya permen terkait kebijakan sekolah lima hari tersebut. Sebab, masih banyak daerah yang masih belum siap mengimplementasikan kebijakan itu.

Karena itu, Presiden kemudian menginstruksikan Mendikbud untuk mengevaluasi kembali kebijakan itu dengan diatur dalam peraturan yang lebih kuat. "Karena ini mempunyai penga-

ruh cakupan yang sangat luas terhadap seluruh anak didik kita, itu nantinya diatur dalam peraturan yang lebih kuat," kata Pramono.

Sedangkan Wapres Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan lima hari sekolah membutuhkan persiapan yang cukup matang dalam waktu minimal satu tahun. Kesiapan tersebut menyangkut semua perubahan yang mendasar mulai dari kesiapan sekolah, guru, murid, masyarakat, dan orang tua.

"(Butuh waktu) setahunlah, jadi yang untuk total kalau semuanya disetujui dulu. Tapi ini kan fleksibel juga, tidak berarti delapan jam harus duduk di kelas. Nanti kita matangkan semuanya, menter-menteri yang matangkan," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa (20/6). Ia menambahkan, persiapan ini perlu dilakukan karena menyangkut kepentingan 50 juta anak sekolah di Indonesia.

Desy Sucitri saputra/rizky jaramaya, edi:fitriyan zamzami

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005